Kasus Hibah Sambas Rp80 Miliar

Dewan Diperiksa Polisi

PONTIANAK, SP – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sambas dipanggil Polda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dana hibah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018 sebesar Rp80 Miliar. Hibah ini ditengarai tak sesuai peruntukan.

Salah satu buktinya, adalah Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor: B/1983/XII/RES.3.5./2019/ Ditreskrimsus-3 tertanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan pada Ketua DPRD Kabupaten Sambas. Surat itu dikirim dalam rangka meminta bantuan menghadir-

• Baca Halaman 7

Kombespol Donny Charles Go
Kabid Humas Polda Kalbar

Kita tidak mau terburu-buru, untuk melindungi hak-hak mereka sebagai terperiksa, karena masih terlalu dini untuk dipublikasikan.

kan anggota DPRD Sambas.

Belum bisa dipastikan siapa saja nama yang dipanggil.

"Iya baiknya kita lakukan pertemuan langsung, agar ini bisa disampaikan dengan baik di Kantor DPRD Sambas," kata Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar via telepon, Minggu (5/1).

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, beberapa anggota DPRD yang jadi saksi menggunakan jasa Firma Hukum Danadyaksa sebagai pendamping hukum mereka. Hal ini dibenarkan oleh pengacara di firma hukum tersebut, Debi Juanda.

"Iya Danadyaksa sebagai pendamping hukum tapi tidak semuanya (anggota DPRD), sebatas itu dulu yang bisa saya sampaikan," sebutnya.

Sumber *Suara Pemred* di kepolisian, menyebutkan sudah ada anggota DPRD Sambas yang memenuhi panggilan dalam kasus tersebut.

"Lebih dari tujuh orang pada Jumat (3/1) kemarin. Sampai memenuhi ruangan. Dan itu sudah beberapa hari sebelumnya juga sama. Tapi belum ada yang ditahan, atau dijadikan tersangka," katanya.

"Semua masih dalam proses pemeriksaan. Tapi memang benar, ada periksaan terhadap anggota-anggota dewan itu," kata sumber yang enggan dikorankan itu.

Sementara Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go mengaku belum mendapat informasi resmi dari Ditreskrimsus terkait pemanggilan anggota dewan Sambas dalam kasus bansos tersebut.

"Mohon maaf, belum bisa kita sampaikan, mungkin jika ada pun masih dalam pemeriksaan. Tapi jika sudah ada LP-nya pasti akan kita sampaikan secara resmi. Siapa-siapa yang diperiksa dan statusnya juga. Kita tidak mau terburu-buru, untuk melindungi hak-hak mereka sebagai terperiksa, karena masih terlalu dini untuk dipublikasikan," kata Donny.

Menariknya, dalam dokumen Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2018, ditemukan dua pokok temuan ketidakpatuhan. Walau sebenarnya, laporan tahun 2018 itu mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Dua pokok temuan itu adalah, *pertama*, pertanggungjawaban Belanja Hibah Barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiha senilai Rp3.658.794.250,- di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak lengkap. *Kedua*, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp801.153.024,- untuk pembayaran kekurangan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan kematian PNSD tidak tepat.

Sehubung dengan temuan itu, BPK merekomendasikan agar Bupati Sambas, *pertama*, memberikan sanksi sesuai ketentuan dan memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, serta Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, supaya dalam pemberian hibah berupa barang berpedoman pada ketentuan tentang pemberian hibah barang.

Kedua, Bupati diminta memberi sanksi sesuai ketentuan dan memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah supaya dalam merealisasikan belanja tidak terduga, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Dokumen tersebut ditandatangani BPK Perwakilan Kalbar sebagai penanggungjawab pemeriksaan, Joko Agus Setyono tertanggal 24 Mei 2019.

Junjung Transparansi

Mantan Ketua Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas, Amirudin meminta Polda Kalbar harus profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini. Profesional dalam hal ini, tidak pandang bulu.

"Siapa pun dia yang terlibat di dalamnya, harus dilakukan periksaan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif terutama pemegang kekuasaan anggaran," katanya.

Dia menerangkan, jika melihat alur penganggaran dana hibah, baik dari proses pengajuan, penganggaran sampai eksekusi, disebutnya banyak melanggar peraturan tentang penganggaran hibah dan bansos.

"Informasi yang kami dapatkan bahwa penanganan kasus hibah Rp80 M ini oleh Polda Kalbar sudah terjadi di tahun 2019 dan sudah banyak pemanggilan, bahkan penyitaan berkas katanya juga sudah dilakukan," sebutnya.

Dia berharap Polda Kalbar bisa memberikan informasi perkembangan kasus. Pasalnya, informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, banyak yang pesimis kasus ini bisa diungkap.

"Isu yang berkembang kasus ini akan dihentikan tetapi semoga ini hanya isu. Saya masih percaya kepada pihak Polda Kalbar bisa selesai dan tuntas dan tidak terpengaruh oleh siapa pun," katanya.

Persoalan kasus hibah Sambas tahun anggaran 2018, baik hibah barang dan uang menurutnya sangat tertutup dan tidak transparan dari pihak eksekutif.

"Persoalan ini pernah kami minta *hearing* ke pihak legislatif melalui surat resmi pada bulan Juli 2019 kepada lembaga DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Sambas periode yang lalu, tetapi tidak pernah ditanggapi sampai sekarang bahkan terkesan ada yang ditutup-tutupi," sebutnya.

"Dengan adanya penanganan kasus hibah ini oleh Polda Kalbar kami harapkan bisa selesai dengan cepat dan juga kasus hibah Rp80 M tidak terhenti di hibah barang, tetapi hibah uang juga," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Sambas, Fery Madagaskar membenarkan bahwa Polda Kalbar telah melakukan serangkaian pemeriksaan.

"Iya, memang sempat dilakukan pemeriksaan oleh Polda Kalbar terkait dana hibah Kabupaten Sambas 2018 beberapa waktu lalu," ungkapnya kemarin.

Dikatakan Fery, dinas yang diperiksa cukup banyak. Terutama yang menyalurkan dana hibah tersebut.

"Kalau terkait ini, tentunya semua dinas yang memang menyalurkan hibah Kabupaten Sambas 2018, misalnya PerkimLH, DinsosPMD, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Ini cuma pemeriksaan kelengkapan administrasi saja. Hal yang wajar dan dinas memiliki kelengkapan administrasi yang dibutuhkan," ujarnya.

Proses pemeriksaan dinas-dinas tersebut, kata Fery, dilakukan sampai bulan Oktober 2019.

"Pemeriksaan dilakukan karena semua dinas yang

ada pos dana hibahnya diperiksa," paparnya.

Dalam hal ini, pihaknya hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan data yang diperlukan Polda Kalbar. Sementara terkait tahapan pemeriksaan, sepenuhnya dilakukan Polda Kalbar. Dinas yang dipanggil berkewajiban memberikan data yang diperlukan.

Meski demikian, pemeriksaan juga sempat dilakukan di Sekretariat Pemda Sambas. Menurut dia hal tersebut sangat membantu karena berkas yang harus diperiksa sangatlah banyak.

"Mereka menumpang agar mempermudah proses, karena dinasnya banyak dan berkasnya banyak pula, jadi lebih efisien demikian, dan kita mendukung proses tersebut," katanya.

Sementara Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili tak ingin berkomentar banyak. Menurutnya, sebaiknya menunggu proses pemeriksaan selesai dilakukan.

"Bagaimanapun ada proses yang sedang berjalan dan kita harus memahami dan memaklumi hal tersebut, agar informasi yang didapat dan disampaikan utuh dan valid," ungkapnya.

Sikap tersebut kata Bupati, diambil Pemda Sambas sebagai bentuk kehati-hatian, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap.

"Kami menghargai antusiasme media massa terkait hal ini. Itu sebagai bentuk perhatian dan pengawasan yang positif, namun kami juga berkeinginan agar biarkan dulu semua selesai dan jelas supaya tidak menimbulkan opini yang tidak jelas," katanya.

Sebelumnya, hasil penelusuran Suara Pemred pada LKPj Bupati Sambas Tahun 2018, tidak terdapat pos khusus dana hibah yang menjelaskan target besaran hibah sebanyak Rp80 miliar, melainkan target belanja hibah 2018 sebesar Rp24.454.200.000.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata item belanja hibah lainnya telah dimasukkan ke dalam pos-pos anggaran kegiatan yang menyebar di sejumlah OPD. Satu satunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD).

Awal Agustus 2019 lalu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas, Rachmad Robbi mengatakan, tak semua OPD dapatkan dana hibah.

"Tidak semua Organisasi Perangkat Daerah dapat dana hibah. Biasanya OPD yang langsung ke masyarakat seperti Dinkes, PU, Dinsos-PMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hibah berupa barang ke masing-masing OPD itu diatur oleh OPD tersebut bentuknya dan penyalurannya seperti apa," kata Robbi, Rabu (31/7/2019).

Besaran atau plafon dana hibah juga telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas peruntukannya.

"Kalau hibah berbentuk uang ada plafonnya sesuai Perbup No 59 Tahun 2018. Dan disalurkan melalui bidang BPKD di Bakeuda. Tata cara pengajuan juga ada di Perbup tersebut," sebut dia.

"Ada juga hibah dari pusat yang sudah diarahkan langsung oleh Pemerintah Pusat, dari DAK non-fisik ini berupa uang. Misalnya, bantuan kepada PAUD atau TK swasta dan lain-lain," jelas Robbi.

Diketahui, dana hibah Pemkab Sambas Tahun 2017 dalam bentuk uang sebesar Rp37,2 miliar dan Rp16.281 miliar dalam bentuk barang. Sedangkan pada tahun 2018 dana hibah dalam bentuk uang sebesar Rp25 miliar dan sisanya dalam bentuk barang. Dari total anggaran hibah 2018 terealisasi Rp75 miliar.

"Besaran dana hibah ini didapat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadikan satu anggaran hibah berupa uang dan barang. Sehingga menjadi Rp75 miliar di APBD 2018. BPK bahkan biasanya melakulan pengecekan kepada pihak penerima hibah tanpa sepengetahuan kita," ungkapnya. **(noi/hd/bls)**